



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 35 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
dan
BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi

bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
23. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
24. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
25. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

5

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.121.637.393.252,00 yang bersumber dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah;
- b) Pendapatan transfer;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 64.037.553.293,00 yang terdiri atas:
 - a) Pajak daerah;
 - b) Retribusi daerah;
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.314.279.871,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.176.108.919,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.000.000.000,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.547.164.503,00.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.314.279.871,00.yang terdiri atas:
 - a) Pajak Reklame;
 - b) Pajak Air Tanah;
 - c) Pajak MBLB;
 - d) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - e) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f) PBJT-Restoran;
 - g) PBJT-Tenaga Listrik;
 - h) PBJT-Jasa Perhotelan;
 - i) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - j) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00;
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 126.398.990,00;
- (4) Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00;
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.850.000.000,00;
- (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00
- (7) PBJT-Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 800.000.000,00;
- (8) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.500.000.000,00;
- (9) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00;
- (10) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 3.057.344.182,00;
- (11) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 6.170.536.699,00;

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.176.108.919,00 yang terdiri atas:
 - a) Retribusi Jasa Umum;
 - b) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - c) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Tempat Khusus Parkir;



- c) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila;
 - d) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - e) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - f) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana ayat (1) huruf c adalah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
 - (5) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00;
 - (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 67.600.000,00;
 - (7) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00;
 - (8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.286.058.919,00;
 - (9) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00;
 - (10) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00;
 - (11) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00;
 - (12) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00;
 - (13) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00; dan
 - (14) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp 12.450.000,00;

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp 20.000.000.000,00.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 21.547.164.503,00 yang terdiri atas:
 - a) Jasa Giro;
 - b) Pendapatan Bunga;
 - c) Pendapatan dari Pengembalian;
 - d) Pendapatan BLUD; dan
- (2) Jasa Giro sebagaimana ayat (1) huruf a diatas direncanakan sebesar Rp 1.009.200.000,00;
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana ayat (1) huruf b diatas direncanakan sebesar Rp 663.595.135,00;
- (4) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana ayat (1) huruf d diatas direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00;
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana ayat (1) huruf e diatas direncanakan sebesar Rp 18.874.369.368,00;

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.044.375.734.541,00 yang terdiri atas:
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b) Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana ayat (1) huruf a diatas terdiri dari :
 - a) Dana Desa;
 - b) Insentif Fiskal;
 - c) Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat;
 - d) Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e) Dana Alokasi Khusus (DAK)
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana ayat (1) huruf b diatas :
 - a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi; dan
 - b) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
- (4) Dana Desa sebagaimana ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 99.992.290.000,00;
- (5) Insentif Fiskal sebagaimana ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.189.743.000,00;

- (6) Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat sebagaimana ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 213.997.112.587,00;
- (7) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp 520.802.014.000,00;
- (8) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp 167.055.167.000,00;
- (9) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi sebagaimana ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.339.407.954,00; dan
- (10) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebagaimana ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,00;

Pasal 10

Anggaran Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 13.224.105.418,00 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.153.770.641.029,00 yang terdiri atas:

- a) Belanja operasional;
- b) Belanja modal;
- c) Belanja tidak terduga; dan
- d) Belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 793.149.213.742,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 423.414.952.445,00;
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 359.836.473.297,00;
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.225.288.000,00;

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 672.500.000,00;

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 423.414.952.445,00 yang terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 311.363.490.490,64;
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 101.367.489.110,36;
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.725.885.489,00;
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 197.207.355,00
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 510.880.000,00;
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 250.000.000,00

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 311.363.490.490,64 yang terdiri atas:
- a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;

- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 229.997.059.103,00;
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.235.823.034,00;
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.978.815.250,00;
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.839.237.900,00;
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.029.982.250,00;
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 11.544.772.764,00;
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 329.769.495,96;
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.112.936.172,00;
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 23.202.252.929,72;
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 520.191.678,96;
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1.572.649.913,00.

Pasal 15

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 101.367.488.910,36.

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.725.885.489,00 yang terdiri atas:
 - a) Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;

- c) Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d) Belanja Uang Paket DPRD;
 - e) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i) Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 561.540.000,00;
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 91.000.000,00;
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 119.000.000,00;
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 54.000.000,00;
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 819.000.000,00;
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 77.830.200,00;
 - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 13.200.000,00;
 - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.890.000.000,00;
 - (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 472.500.000,00;
 - (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 262.914.089,00
 - (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1.760.500.000,00;
 - (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 3.564.000.000,00;
 - (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 40.401.200,00.

h

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 197.207.355,00 yang terdiri atas:
 - a) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
 - i) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.838.000,00;
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.533.320,00;
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 101.228.400,00;
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.494.360,00;
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 709.716,00;
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.207,00;
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 6.581.484,00;
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 274.960,00; dan
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 544.908,00;

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 510.880.000,00 yang terdiri atas:
 - a) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan

- b) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 110.880.000,00; dan
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00.

Pasal 19

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 250.000.000,00

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 359.836.473.297,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 114.244.138.512,00;
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 96.054.779.611,00;
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.469.768.000,00;
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 84.937.567.500,00;
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.102.045.000,00;
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 16.075.812.606,00;

- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.138.478.500,00 dan
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 16.813.883.568,00

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.225.288.000,00 yang terdiri atas :
 - a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b) Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.949.716.000,00; dan
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.275.572.000,00.

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 672.500.000,00 yang terdiri atas:
 - a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 222.500.000,00; dan
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 450.000.000,00

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp 180.118.406.126,00 yang terdiri atas :
 - a) Belanja Modal Tanah;
 - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f) Belanja Modal Aset Lainnya;

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 260.505.606,00;
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 48.307.326.076,00;
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 43.135.821.000,00;
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 81.538.588.000,00;
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.574.665.444,00; dan
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.301.500.000,00.

Pasal 24

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 260.505.606,00 yang merupakan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan tempat kerja.

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 48.307.326.076,00 terdiri atas :
 - a) Belanja Modal Alat Besar;
 - b) Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d) Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h) Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i) Belanja Modal Komputer;
 - j) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k) Belanja Modal Alat peraga;
 - l) Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m) Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - o) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.494.416.550,00;
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.552.384.000,00;
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 458.200.000,00;
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.000.000,00;
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.793.825.014,00;
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 5.368.550.000,00
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 9.408.237.250,00;
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.439.003.000,00;
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 6.017.501.000,00;
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 136.472.562,00;
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 130.000.000,00;
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 49.875.000,00;
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 12.000.000,00;
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 1.800.375.900,00 dan
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 640.485.800,00.

Pasal 26

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 43.135.821.000,00 terdiri atas :
 - a) Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan

- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 39.698.821.000,00;
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.367.000.000,00; dan
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.070.000.000,00

Pasal 27

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 81.538.588.000,00 terdiri atas :
 - a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b) Belanja Modal Bangunan Air;
 - c) Belanja Modal Instalasi;
 - d) Belanja Modal Jaringan; dan
 - e) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 53.884.984.000,00;
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.279.714.000,00;
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.974.640.000,00;
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.299.250.000,00; dan
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00

Pasal 28

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.574.665.444,00 terdiri atas :
 - a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.682.281.950,00
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.500.000,00
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 887.883.494,00

Pasal 29

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.301.500.000,00 terdiri atas :
 - a) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software;
 - b) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian; dan
 - c) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 740.000.000,00
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.411.500.000,00

Pasal 30

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp 4.355.365.385,00

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp 176.147.655.776,00 yang terdiri atas:
 - a) Belanja Bagi Hasil; dan
 - b) Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana ayat (1) huruf a Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp 1.316.852.776,00
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 174.830.803.000,00

Pasal 32

Anggaran pembiayaan daerah tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 32.133.247.777,00 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 33

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp 34.133.247.777,00,00 yang merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

Pasal 34

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang direncanakan sebesar Rp 34.133.247.777,00 merupakan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja

Pasal 35

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 merupakan Penyertaan modal daerah.

Pasal 36

Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 34 direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(32.133.247.77,00)
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp32.133.247.77,00

Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana yang dimaksud pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- 1) Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 2) Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 3) Lampiran III.a : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD pemeberi Hibah;
- 4) Lampiran III.b : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD pemeberi Hibah;
- 5) Lampiran IV.a : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi BatuanSosial;
- 6) Lampiran IV.b : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi BatuanSosial;
- 7) Lampiran V.a : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum yang diterima serta SKPD Pemberi BantuanKeuangan;
- 8) Lampiran V.b : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- 9) Lampiran VI.a : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Belanja bagi hasil Kepada Pemerintah Desa;

Pasal 39

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 31 Desember 2024
BUPATI KOLAKA UTARA



Diundangkan di Lasusua
Pada tanggal, 31 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 35



KABUPATEN KOLAKA UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.037.553.293,00
4.1.01	Pajak Daerah	20.314.279.871,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	150.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	150.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	150.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	126.398.990,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	126.398.990,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	126.398.990,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000,00
4.1.01.14.39	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	600.000.000,00
4.1.01.14.39.0001	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	600.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.850.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	2.850.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.850.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.360.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	800.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	800.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	5.500.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	5.500.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	60.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	45.000.000,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	15.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.057.344.182,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	3.057.344.182,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	3.057.344.182,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.170.536.699,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	6.170.536.699,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	6.170.536.699,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.176.108.919,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	247.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	30.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	30.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	67.600.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	30.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	37.600.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	150.000.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	150.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.728.508.919,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.286.058.919,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	573.000.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	513.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	200.058.919,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	10.000.000,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	10.000.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	300.000.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	300.000.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	20.000.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	20.000.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	12.450.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	12.450.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.000.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	20.000.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	20.000.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	20.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.547.164.503,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.009.200.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.009.200.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.009.200.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	663.595.135,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	663.595.135,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	663.595.135,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.000.000.000,00
4.1.04.15.04.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	1.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	18.874.369.368,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	18.874.369.368,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	18.874.369.368,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.044.375.734.541,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.009.036.326.587,00
4.2.01.05	Dana Desa	99.992.290.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	99.992.290.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	99.992.290.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.189.743.000,00
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.189.743.000,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.189.743.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	213.997.112.587,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	10.197.767.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	7.424.254.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.773.513.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	203.161.650.587,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	203.161.650.587,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	637.695.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	637.695.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	520.802.014.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	449.971.160.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	449.971.160.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	70.830.854.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.200.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2.973.616.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	29.401.459.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	21.231.686.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	16.024.093.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	167.055.167.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	65.995.635.000,00
4.2.01.09.01.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	351.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	32.668.648.000,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.390.818.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	26.804.500.000,00
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	1.349.883.000,00
4.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	214.166.000,00
4.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	216.120.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	101.059.532.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	17.568.722.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.085.250.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	47.975.958.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	300.500.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.783.076.000,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	750.000.000,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	386.690.000,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.949.000.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.094.172.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.201.500.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	8.158.282.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	13.135.722.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.339.407.954,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	20.339.407.954,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.339.407.954,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.891.056.285,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.448.351.669,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	15.000.000.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	15.000.000.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	15.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.224.105.418,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.224.105.418,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.224.105.418,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.224.105.418,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.224.105.418,00
	Jumlah Pendapatan	1.121.637.393.252,00
5	BELANJA DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1	BELANJA OPERASI	793.149.213.742,00
5.1.01	Belanja Pegawai	423.414.952.445,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	311.363.490.490,64
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	229.997.059.103,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	185.191.091.218,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	44.805.967.885,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.235.823.034,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	16.629.640.408,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.606.182.626,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.978.815.250,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.978.815.250,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.839.237.900,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.707.217.900,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	132.020.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.029.982.250,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.844.549.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.185.433.250,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.544.772.764,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.513.083.979,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.031.688.785,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	329.769.495,96
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	329.769.495,96
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.112.936.172,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	932.261.883,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	180.674.289,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.202.252.929,72
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	20.672.173.842,72
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.530.079.087,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	520.191.678,96
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	431.170.434,96
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	89.021.244,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.572.649.913,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.305.592.438,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	267.057.475,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	101.367.489.110,36
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	49.458.292.972,36
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	47.498.292.972,36

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.960.000.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	480.000.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	480.000.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	39.906.348,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	39.906.348,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	529.850.376,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	529.850.376,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.859.439.414,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	6.000.000,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	30.000.000,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	16.750.000,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	240.000.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	19.888.682,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	129.026.161,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	42.500.000,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	19.500.000,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.500.000,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	3.352.950,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakalan Kekayaan Daerah	31.950.750,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2.271.477,00
5.1.01.02.06.0040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	11.891.600,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	500.000,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.000.000,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	10.000.000,00
5.1.01.02.06.0060	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	15.000.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	47.188.731.794,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.783.076.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	300.500.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.725.885.489,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	91.000.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	91.000.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	119.000.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	119.000.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	54.000.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	54.000.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	819.000.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	819.000.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	77.830.200,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	77.830.200,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.200.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.200.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	262.914.089,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	262.914.089,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.760.500.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	23.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	27.500.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.650.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.564.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.564.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	40.401.200,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	40.401.200,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	197.207.355,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	68.838.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	68.838.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.533.320,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.533.320,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	101.228.400,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	101.228.400,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.494.360,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.494.360,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	709.716,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	709.716,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.207,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.207,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.581.484,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.581.484,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	274.960,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	274.960,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	544.908,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	544.908,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	250.000.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	250.000.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	250.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.836.473.297,00
5.1.02.01	Belanja Barang	114.244.138.512,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	113.897.548.448,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	144.849.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	347.941.040,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.272.995.925,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.462.300,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	118.277.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	576.908.073,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	173.220.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.545.942.750,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.360.000.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	468.734.260,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	64.488.479,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.200.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.409.285.086,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.341.878.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.262.270.713,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	242.181.673,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	297.399.188,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	579.990.900,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	325.794.100,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.920.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	54.120.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	18.200.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	511.863.400,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.799.214.268,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.089.146.927,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.119.571.466,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	21.360.347.500,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	76.520.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	60.093.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	131.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.938.840.200,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.865.369.700,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	19.994.280.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.271.600.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.982.750.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	150.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	462.500.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	16.220.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.281.017.500,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	173.380.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	11.100.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	104.350.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	139.130.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	193.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	344.767.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	585.774.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	615.655.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	333.823.436,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	99.850.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	9.000.000,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	217.745.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	7.228.436,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	12.766.628,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	11.066.628,00
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	1.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	96.054.779.611,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	68.070.313.411,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.888.565.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	573.890.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	2.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.558.100.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.063.800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	15.570.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	45.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	8.475.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	556.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	13.902.854.514,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	550.450.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.870.800.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.635.600.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.537.600.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	212.200.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	308.500.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	54.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	300.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	41.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	473.834.040,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.365.500.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	638.400.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	928.050.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.543.545.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.044.403.058,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	574.200.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	294.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.719.000.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	276.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	243.600.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	134.350.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	23.650.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	87.900.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	14.500.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	822.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	21.400.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	76.845.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	175.713.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	32.280.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	85.000.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	180.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.178.720.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	226.416.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	643.821.452,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.643.131.347,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	489.180.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.948.646.200,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	106.023.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	105.169.800,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.841.410.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.341.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	137.500.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	742.200.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	852.120.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	27.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.477.192.000,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.138.992.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	9.000.000.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	201.600.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	64.600.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	72.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.707.095.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	33.950.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	708.660.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	300.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	339.110.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	84.475.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53.100.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	17.500.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	1.000.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	410.000.000,00
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	7.500.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	45.000.000,00
5.1.02.02.04.0505	Belanja Sewa Peralatan Permainan	1.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.797.797.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	431.995.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	37.500.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	217.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.049.800.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	61.002.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	36.750.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	36.750.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	103.000.000,00
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	103.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.568.000.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	3.818.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	650.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	316.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	16.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	300.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.531.082.200,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.016.722.200,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.695.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.635.460.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.183.900.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	27.550.000,00
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	27.550.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	420.000.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	420.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.469.768.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.983.407.000,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	46.000.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	125.000.000,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	558.632.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	32.775.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	6.000.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	45.500.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.801.310.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	559.760.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	473.090.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	195.000.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	148.130.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	17.500.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	270.400.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	120.000.000,00
5.1.02.03.02.0203	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.930.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	274.200.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	153.180.000,00
5.1.02.03.02.0450	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	3.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.431.361.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.660.411.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	200.000.000,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	120.000.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	200.000.000,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	300.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	117.000.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	4.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	180.000.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	259.950.000,00
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	170.000.000,00
5.1.02.03.03.0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	200.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.055.000.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	6.790.000.000,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	850.000.000,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.200.000.000,00
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	700.000.000,00
5.1.02.03.04.0122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	350.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	150.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	84.937.567.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.937.567.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.705.519.800,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.402.924.700,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	829.123.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.102.045.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.802.045.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.102.290.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	106.200.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	399.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.500.000,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	20.160.000,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	4.171.895.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	300.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	300.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	16.075.812.606,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	15.532.232.606,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	14.759.482.606,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	772.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	215.800.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	185.800.000,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	327.780.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	282.780.000,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.138.478.500,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.138.478.500,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.138.478.500,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.813.883.568,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.813.883.568,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.813.883.568,00
5.1.05	Belanja Hibah	9.225.288.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.949.716.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.899.716.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.899.716.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.430.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.430.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.620.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.620.000.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	4.275.572.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	542.500.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	542.500.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.981.372.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.981.372.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.751.700.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.751.700.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	672.500.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	222.500.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	222.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	222.500.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	450.000.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	450.000.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	450.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2	BELANJA MODAL	180.118.406.126,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	260.505.606,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	260.505.606,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	260.505.606,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	260.505.606,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.307.326.076,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.494.416.550,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	650.000.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	650.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.844.416.550,00
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	95.000.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	1.567.920.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	10.496.550,00
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	77.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	94.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	12.552.384.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	12.501.384.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.344.100.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.175.600.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.581.684.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	200.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.200.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	51.000.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	51.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	458.200.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	296.200.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	296.200.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	162.000.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	162.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	6.000.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	6.000.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	6.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.793.825.014,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.459.290.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	184.800.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.274.490.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.974.860.014,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.084.275.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	19.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	401.274.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	25.237.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.198.850.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	246.224.014,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.359.675.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	602.237.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	71.500.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	335.358.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	36.000.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	98.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	216.580.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.368.550.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	5.334.450.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	178.500.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	169.000.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	43.000.000,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	72.500.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	4.871.450.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	34.100.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	2.000.000,00
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	9.000.000,00
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	3.600.000,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	18.000.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	1.500.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.408.237.250,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	9.408.237.250,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	9.197.927.250,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	202.000.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	8.310.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.439.003.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	89.120.000,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	89.120.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.349.883.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.349.883.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.017.501.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	5.488.601.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.978.631.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	509.970.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	528.900.000,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	8.775.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	28.725.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	71.250.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	221.050.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	199.100.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	136.472.562,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	88.222.562,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	9.157.500,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	58.830.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	20.235.062,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	33.250.000,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	3.000.000,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	30.250.000,00
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	15.000.000,00
5.2.02.15.04.0006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Fasklektrik	15.000.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	130.000.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	130.000.000,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	130.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	49.875.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	49.875.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	30.000.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	19.875.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	12.000.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	12.000.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	12.000.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	1.800.375.900,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	1.691.355.900,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	1.491.355.900,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	200.000.000,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	32.000.000,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	32.000.000,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	77.020.000,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	77.020.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	640.485.800,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	640.485.800,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	640.485.800,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.135.821.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	39.698.821.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	38.479.077.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	840.750.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	23.062.500.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.391.000.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.392.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.563.327.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	35.000.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.381.000.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	100.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	4.513.500.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.219.744.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	801.500.000,00
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	418.244.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.367.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.367.000.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	653.500.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.713.500.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.070.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.070.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.070.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.538.588.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	53.884.984.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	48.694.734.000,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	48.504.734.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	190.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	5.190.250.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	5.150.100.000,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	40.150.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	17.279.714.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.660.900.000,00
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	542.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.118.300.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.008.300.000,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3.947.500.000,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.569.700.000,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	491.100.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.657.584.000,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.257.584.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	400.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	6.952.930.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	6.952.930.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.974.640.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.216.240.000,00
5.2.04.03.01.0001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	20.240.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.196.000.000,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	846.400.000,00
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	846.400.000,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	1.912.000.000,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	1.912.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	5.299.250.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.261.750.000,00
5.2.04.04.01.0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi	3.790.450.000,00
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	471.300.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.037.500.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.037.500.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	100.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	100.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	100.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.574.665.444,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.682.281.950,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.682.281.950,00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	3.600.000,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	3.500.000,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	3.000.000,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	3.200.000,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	10.200.000,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	11.800.000,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	2.700.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan	396.000.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	3.248.281.950,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4.500.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	4.500.000,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	4.500.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	887.883.494,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	887.883.494,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	797.883.494,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	90.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.301.500.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.301.500.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.301.500.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	150.000.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	740.000.000,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.411.500.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.355.365.385,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.355.365.385,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.355.365.385,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.355.365.385,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.355.365.385,00
5.4	BELANJA TRANSFER	176.147.655.776,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.316.852.776,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.316.852.776,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.316.852.776,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.316.852.776,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	174.830.803.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	174.830.803.000,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	99.992.290.000,00
5.4.02.05.01.0002	Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa	99.992.290.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	74.838.513.000,00
5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	74.838.513.000,00
	Jumlah Belanja	1.153.770.641.029,00
	Total Surplus/(Defisit)	-32.133.247.777,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.133.247.777,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.133.247.777,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	34.133.247.777,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	34.133.247.777,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	34.133.247.777,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	32.133.247.777,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Kolaka Utara, 31 Desember 2024

Pj Bupati



YUSMIN, S.Pd., M.H.